
PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di BEI Periode 2016 sampai 2018)**

Khoirul Amin, Nanang Agus Suyono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sains Al-Qur'an
Jawa Tengah di Wonosobo
Email: aminkhoirul12@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016 sampai 2018 yaitu sebanyak 162 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sehingga yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 31 perusahaan. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS v.23 untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pertimbangan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, dan dapat memberikan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Kata Kunci : Tax Avoidance, Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Manajerial.

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of institutional ownership, independent commissioner, audit committee, audit quality and management ownership to tax avoidance at manufacturing company listed on BEI year 2016-2018. The population of this study is manufacturing companies listed on the BEI 2016-2018 as many as 162 companies. Sampling used in this research purposive sampling method. Data source is secondary data obtained from company website and BEI website (www.idx.co.id). This study uses multiple regression analysis to analyze data with the help of SPSS 23 edition program. The results of this study indicate that the variables of institutional ownership have significant influence on tax avoidance, while independent commissioner, audit committee, audit quality and management ownership has no significant effect on tax avoidance. The results of this study are expected to be an additional consideration of the management in conducting tax avoidance is correct and efficient without violating applicable tax laws, and can provide additional information for users of financial statements in investment decision making

Keywords : Tax Avoidance, Corporate Governance, institutional ownership, independent commissioner, audit committee, audit quality and management ownership.

1. PENDAHULUAN

Pajak menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Indrawati, 2017).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk mendorong kemajuan ekonomi, membangun infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, serta kemakmuran rakyat. Di Indonesia sebesar 70% lebih penerimaan negara bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun daerah. Melihat potensi dan peran pajak yang begitu besar bagi negara maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mukhsin, 2018).

Tetapi meskipun realisasi penerimaan pajak negara terus meningkat namun penerimaan pajak dari sektor manufaktur justru melambat. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs <http://ekonomi.bisnis.com>, pada tahun 2016 sampai 2018 penyumbang pajak terbesar di Indonesia yaitu sektor manufaktur selalu mengalami penurunan kontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Kontribusi Pajak Manufaktur terhadap Penerimaan Pajak Negara periode 2016 sampai 2018

Tahun	Total Penerimaan Pajak an Pajak Negara	Penerimaan Pajak dari Sektor Manufaktur	Kontribusi Pajak Manufaktur terhadap Total Penerimaan Pajak
2016	1.094,2	364,7	33,3 %
2017	1.151,1	368,3	31,9 %
2018	1.315,9	394,7	29,9 %

Sumber : <http://ekonomi.bisnis.com>, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2018 kontribusi pajak manufaktur terhadap penerimaan pajak negara selalu mengalami penurunan. Besarnya kontribusi pajak manufaktur pada tahun 2016 adalah sebesar 33,3%, tahun 2017 sebesar 31,9%, tahun 2018 sebesar 29,9%. Hal ini menjadi pertanyaan faktor apa yang mempengaruhi penurunannya kontribusi penerimaan pajak manufaktur (Darmayanti, 2019).

Penurunan kontribusi pajak manufaktur terhadap penerimaan pajak negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Setiawan, 2018). Dalam upaya mengurangi beban pajak, perusahaan dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* adalah salah satu cara dari manajemen pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak dari nominal seharusnya, namun dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang ada didalam perundang-undangan perpajakan (Putri, 2017).

Beberapa variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* menurut Darmawan IGH dan Sukartha IM (2014) salah satunya adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Prasetyo, 2018). Karakteristik *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sri Mulyani dkk (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sri Mulyani dkk (2018) terletak pada variabel independen yang diteliti. Dalam penelitian ini menambah variabel baru yaitu kepemilikan manajerial. Dengan alasan manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam kemakmuran pemegang saham, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik dalam mempengaruhi penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). Selain itu penelitian Sri Mulyani (2018) mengambil obyek pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini mengambil obyek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pajak perusahaan terbesar di Indonesia

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah menurunnya kontribusi pajak manufaktur terhadap penerimaan pajak negara, yang di sebabkan oleh salah satu faktor yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018.

2. METODE

2.1. Definisi Operasional dan Perhitungan Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat atau dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) peraturan perpajakan sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Mukhsin, 2018). Untuk mengukur perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dimana Semakin tinggi nilai Cash ETR maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah (Andrean, 2018). Perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen (X)

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2012). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Manajerial.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusional pada akhir tahun. Pemilik institusi yang dimaksud adalah pihak luar yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan tersebut biasanya dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, lembaga asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Indriawati, 2017). Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara kepemilikan saham oleh institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar (Charisma, 2019). Perhitungan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{saham institusional}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi untuk bertindak independen (Ghozali, 2012). Berdasarkan peraturan BEI nomor kep-205/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance* (Eksandy, 2017). Berdasarkan penelitian Sandy (2015) komisaris independen diukur dengan persentase keberadaan komisaris independen dalam perusahaan. Dirumuskan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dalam tugasnya membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses laporan keuangan agar disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan agar pelaksanaan audit terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku (Zahro, 2018). Berdasarkan peraturan BAPEPAM dan kementerian BUMN, bahwa komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang dengan dua orang eksternal yang independen serta

menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Djefris, 2018). Perhitungan sebagai berikut :

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit seperti yang dikatakan oleh De Angelo (1981) adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan audit (Setyawan, 2018). Zurianti dan Apriyanti (2018) mengungkapkan, audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dan independen. Kualitas audit dapat diukur dengan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan dalam mengaudit perusahaan. KAP besar yang sering disebut *KAP the big four* dipertimbangkan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibanding dengan KAP *non the big four* (Mahaputra, 2016). Dalam penelitian ini kualitas audit menurut Mahaputra (2016) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, jika perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP *the big four* akan diberi nilai 0.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak manajemen. Saham ini umumnya dimiliki oleh komisaris, direksi, sekretaris perusahaan, atau karyawan dari perusahaan sendiri (Sihaloho dan Pratomo, 2015). Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) variabel kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar. Perhitungan dijabarkan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Saham dimiliki manajerial}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.2. Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu berjumlah 162 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2012).

Kriteria data perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2016 sampai 2018.
- Terdapat laporan keuangan tahunan selama empat tahun berturut-turut (tahun 2016-2018).
- Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan mata uang asing, meskipun bisa dikonversi tetapi dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
- Perusahaan yang memiliki nilai laba positif.
- Perusahaan yang menyajikan data lengkap mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2 merupakan rangkuman hasil proses pengambilan sampel yang telah dilakukan :

Tabel 2. Rangkuman Hasil Proses Pengambilan Sampel Perusahaan

No	Kriteria Pengambilan Sampel Perusahaan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2018	162
2	Eliminasi perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut periode 2016 sampai 2018	(43)

3	Eliminasi Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangan	(26)
4	Eliminasi Perusahaan yang mengalami kerugian atau memiliki nilai laba negatif dalam laporan keuangan	(31)
5	Perusahaan tidak menyajikan data lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini	(31)
Sampel Perusahaan		31
Periode Penelitian		3 tahun
Jumlah Sampel Penelitian		93

Sumber : Data sekunder diolah (Periode 2016 sampai 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipasi. Observasi non partisipasi adalah observasi yang dilakukan tanpa melibatkan diri dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengamatan dari jurnal-jurnal akuntansi, mempelajari buku-buku serta mengunduh data dan informasi dari situs internet yang mendukung dan relevan.

Teknik Analisis Data Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskripsi yang digunakan antara lain, rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. (Imam Ghazali, 2011).

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau

mendekati normal dilakukan dengan cara menggunakan uji *kolmogorof-smirnov*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitas signifikannya diatas kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Imam Ghozali, 2011).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas maka dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* lawannya *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independennya (Imam Ghozali, 2011)

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk melakukan pengujian terhadap asumsi ini dilakukan dengan menggunakan analisis dengan grafik plots. Apabila titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y maka dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t -1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Run Test*. *Run Test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random* atau tidak (sistematis). Uji *run test* dibandingkan dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan (5%). Apabila nilai hasil uji *run test* lebih besar daripada tingkat signifikan (α), maka tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji dan sebaliknya (Imam Ghozali, 2011).

Uji Hipotesis

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 - \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	: Tax avoidance
α	: Nilai konstan
β	: Koefisien arah regresi
X ₁	: Kepemilikan institusional
X ₂	: Komisaris independen
X ₃	: Komite Audit
X ₄	: Kualitas Audit
X ₅	: Kepemilikan Manajerial
e	: Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Manajerial maka perlu dilakukan analisis deskriptif statistik. Berdasarkan *output* analisis deskriptif dengan bantuan *software IBM SPSS Statistics v.23* pada lampiran 4, hasil statistik deskriptif dari data penelitian ini ditunjukkan pada table 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	93	32,2156	99,5855	76,866978	17,0975416
Komisaris Independen	93	25,0000	66,6667	40,533078	9,2842288
Komite Audit Kualitas Audit	93	3	5	3,14	,379
Kepemilikan Manajerial	93	,0001	38,0269	6,521327	10,5508928
Penghindaran Pajak	93	,1016	,5761	,262015	,0786606
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Beberapa penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik deskriptif diuraikan sebagai berikut:

Tax Avoidance (penghindaran pajak)

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata penghindaran pajak 0,262015 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0786606. Dengan kata lain penghindaran pajak memiliki variabilitas sebesar 0,0786606 atau menyimpang 0,0786606 dari nilai rata-ratanya. Nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 0,5761 yang dimiliki oleh perusahaan ISSP tahun 2017, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,1016 yang dimiliki oleh perusahaan IMPC tahun 2018. Tingginya nilai rata-rata penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini cenderung melakukan upaya pengurangan atau penghindaran kewajiban pajak.

Kepemilikan Institusional

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional 76,866978 atau 76,9% dengan nilai standar deviasi sebesar 17,0975416. Dengan kata lain kepemilikan institusional memiliki variabilitas sebesar 17,0975416 atau menyimpang 17,0975416 dari

nilai rata-ratanya. Nilai maksimum kepemilikan institusional sebesar 99,5855 yang dimiliki perusahaan IMPC tahun 2018, sedangkan nilai minimumnya sebesar 32,2156 yang dimiliki perusahaan LMSH tahun 2017. Diketahui bahwa nilai rata-rata kepemilikan institusional yaitu sebesar 76,9% yang berarti bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh institusi atau lembaga dalam negeri maupun lembaga luar negeri.

Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata komisararis independen 40,533078 dengan nilai standar deviasi sebesar 9,2842288. Dengan kata lain komisararis independen memiliki variabilitas sebesar 9,2842288 atau menyimpang 9,2842288 dari nilai rata-ratanya. Nilai maksimum komisararis independen sebesar 66,6667 yang dimiliki oleh perusahaan CPIN tahun 2017, sedangkan nilai minimumnya sebesar 25,0000 yang dimiliki oleh perusahaan WTON tahun 2016. Nilai rata-rata komisararis independen sebesar 40,533078 yang berarti bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dalam peraturan BEI dengan keberadaan komisararis independen minimal yaitu 30% dari seluruh jumlah komisararis perusahaan.

Komite Audit

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata komite audit 3,14 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,379. Dengan kata lain komite audit memiliki variabilitas sebesar 0,379 atau menyimpang 0,379 dari nilai rata-ratanya. Nilai maksimum komite audit sebesar 5 yang dimiliki oleh perusahaan CPIN tahun 2016, sedangkan nilai minimumnya sebesar 3 yang dimiliki mayoritas perusahaan manufaktur dalam penelitian ini. Diketahui bahwa nilai rata-rata komite audit sebesar 3,14 yang berarti bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat peraturan BEI dengan komposisi komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dengan dua orang eksternal yang independen.

Kualitas Audit

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata kualitas audit 0,32 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,470. Dengan kata lain kualitas audit memiliki variabilitas sebesar 0,470 atau menyimpang 0,470 dari nilai rata-ratanya. Nilai maksimum kualitas audit sebesar 1 dimiliki oleh perusahaan yang menggunakan jasa auditor anggota KAP *the big four*, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0 dimiliki perusahaan yang menggunakan jasa auditor KAP *non the big four*. Diketahui bahwa nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0,32 yang berarti bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini banyak yang menggunakan jasa auditor dari KAP *non the big four*.

Kepemilikan Manajerial

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata kepemilikan manajerial 6,521327 dengan nilai standar deviasi sebesar 10,5508928. Dengan kata lain kepemilikan manajerial memiliki variabilitas sebesar 10,5508928 atau menyimpang 10,5508928 dari nilai rata-ratanya. Nilai maksimum kepemilikan manajerial sebesar 38,0269 yang dimiliki oleh perusahaan WIIM tahun 2018, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh perusahaan SMGR tahun 2017. Diketahui bahwa nilai rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 6.521327% yang berarti bahwa pada perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan sendiri merupakan sebagian kecil dari seluruh jumlah saham yang beredar.

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil pengolahan data menggunakan program *IBM SPSS Statistics v.23* yang dirangkum melalui tabel berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,375	,087		1	,737
	Kepemilikan institusional	-,002	,001	-,437		,120
	Komisaris independen	-,001	,001	-,068		,007
	Komite audit	,025	,024	,120		,513
	Kualitas audit	,001	,020	,006		,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran 6).

Berdasarkan tabel 9, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,375 - 0,002\text{kepins} - 0,001\text{komind} - 0,025\text{koma} - 0,001\text{kua} - 0,003\text{kepmn} + 0,07644$$

3.2.Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama pada tabel 9 membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tingginya kepemilikan institusional akan menurunkan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong para manajemen untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan agar dalam menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Institusional dengan besarnya kepemilikan saham akan memonitor kinerja perusahaan agar meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham dan tidak menghendaki penghindaran pajak dari kepentingan manajemen yang mengandung resiko pemeriksaan.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua pada tabel 9 membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan

dalam hal perpajakan. Karena komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi, selain itu tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga pada tabel 9 membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat pada tabel 9 membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* maupun KAP *non the big four* terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standart Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAIP maka dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima pada tabel 9 membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tinggi rendahnya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan sendiri tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sendiri masih tergolong kecil dari seluruh jumlah saham yang beredar, sehingga tidak memiliki hak yang besar dalam pengambilan keputusan para pemilik saham perusahaan. Oleh karena itu manajer pemilik saham perusahaan tidak menekankan keinginannya dalam meminimalisir penghindaran pajak.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (H1 diterima).
- b. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (H2 ditolak).
- c. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (H3 ditolak).
- d. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (H4 diterima).
- e. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (H5 ditolak).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrean, Dany. 2019. *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Vinancial Leverage terhadap Agresivitas Pajak*. Skripsi. Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri. Jakarta.
- Charisma, Rezia Bayu. Susi Dwimulyani. 2019. *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating*. Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Trisakti.
- Darmawan IGH dan Sukartha IM. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran perusahaan pada penghindaran pajak*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
- Djefris, Dedy. Eliyanora. Yossi Septriyani. Lailaturrahmi. Nissa Erlina. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Dharma Andalas. Vol.20. No.2. Politeknik Negeri Padang.
- Eksandy, Arry. 2017. *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Vol. 1. No. 1.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Lalita. 2017. *Pengaruh Corporate Governance dan Political Connection terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang tercatat di BEI*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya.
- Maheswari, Anindita MC. 2018. *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan CSR terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI*. Skripsi. Studi Kuntansi. Setie Widya Wiwaha.
- Mukhsin, Muhamad. 2018. *Pengaruh GCG terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Mulyani, Sri. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 3. No. 1 (2018) 322-340. Fakultas Ekonomi. Universitas Batik Surakarta.
- Prasetyo, Irwan. Bambang Agus Pramuka. 2018. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris*

- Independen terhadap Tax Avoidance.* Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA). Vol.20 No.02 (2018).
- Putri, Alifianti Herdian. Anis Chariri. 2017. *Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Praktik Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur.* Ejournal-s1.undip.ac.id. Vol.6(2). Hal.1-11.
- Salamah, Robiatus. 2018. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45.* Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri. Malang.
- Sandy, Syeldila dan Lukviarman, Niki. 2015. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.* Studi Empiris pada perusahaan manufaktur. JAAI. Vol. 10. No. 2. Pp. 85-98.
- Santoso TB. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.* Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiawan, Septiyan Rolin Adi. 2018. *Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak* (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI). Skripsi. Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah. Wonosobo.
- Setyawan, Fajar Dwiki. 2018. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance.* Skripsi. Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shinta, Wigya Afrilia. 2017. *Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Kinerja Keuangan dan Corporate Governance terhadap Agresifitas Pajak.* Skripsi. Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Sihaloho, Sefnia Lora. Dudi Pratomo. 2015. *Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Eksekutif terhadap Ttax Avoidance.* e-proceeding of manajement Vol.2 No.3. Prodi S1 Akuntansi. Universitas Telkom.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Alfabeta. Bandung.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2015. *Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance.* Jurnal Akuntansi. Institut Bisnis dan Informatikan Kwik Kian Gie.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Zahro, Fatimatuz. Afifudin. M Cholid Mawardi. *Pengaruh Penghindran Pajak dan Corporate Governance terhadap Cost Of Debt*. E-JRA Vol.07 No.06. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Malang.

Zurianti, Evitya. Prima Apriliani R. Asri Eka R. 2018. *Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di BEI*. Jurnal Akuntansi. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau.